

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriana (2020). Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan Di Kecamatan Kie. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*. 1(2), pp. 1–21.
- Aggarwal, T. and Srivastava, S. (2017). Nutritional Status And Its Correlates In Under Five Children Of Labour Population In Urban Slums Of Lucknow, Uttar Pradesh, India. *International Journal of Contemporary Pediatrics*, 4(4). doi: 10.18203/2349-3291.ijcp20172518.
- Anggreni, D., Lubis, L. A. and Kusmanto, H. (2022). Implementasi Program Pencegahan stunting di Puskesmas Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara. *Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum dan Humaniora* 1(2), pp. 91–99.
- Aryastami, N. K. *et al.* (2017). Low Birth Weight Was the Most Dominant Predictor Associated with Stunting Among Children Aged 12-23 Months in Indonesia. *BMC Nutrition*. 3(1), pp. 1–6. doi: 10.1186/s40795-017-0130-x.
- Ayuningtyas, A., Simbolon, D. and Rizal, A. (2018). Asupan Zat Gizi Makro dan Mikro terhadap Kejadian Stunting pada Balita. *Jurnal Kesehatan*, 9(3), pp. 445. doi: 10.26630/jk.v9i3.960.
- Bahry, S. (2021). Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting di Kabupaten Enrekang.
- Candra, A. (2020). Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, Epidemiologi Stunting.
- Dafiriadi (2021). Implementasi Program Penanggulangan Stunting Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. *Skripsi*.
- Damayanti, D. (2021). Implementasi Program Penurunan Stunting Melalui Dana Desa (Study Di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas). *Public Policy and Managament Inquiry*, 5(1), pp. 242–255.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (2015). Profil Kesehatan 2015. *Pedoman Kesehatan Jiwa Remaja*.
- Dinas Kesehatan Sulsel (2022). Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Available at: <http://dinkes.sulselprov.go.id>.

- Dinas Kesehatan Enrekang. (2019) Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang. *Enrekang: Dinkes Kab. Enrekang*. doi: 10.1136/archdischild-2016-311050.
- Gibney M (2009). Gizi Kesehatan Masyarakat. *EGC. Jakarta*.
- Hidayat, H. N. *et al.* (2022). Situasi Kesehatan Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Literatur. *FKM Universitas Indonesia*.
- Husna, A., Subekti, E. and Finanda, S. S. (2019). Implementasi Penanganan Stunting di Indonesia Dengan Perbaikan Dimensi Multisektor. *Prosiding Seminar Nasional "Menjadi Mahasiswa yang Unggul di Era Industri 4.0 dan Society 5.0"*, pp. 135–138.
- Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. *Washington DC: Congressional Quarterly Press*.
- Jones, C. O. (1984). An Introduction to the Study of Public Policy. *Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing Company*.
- Kemendes RI (2017). Gizi, Investasi Masa Depan Bangsa. *Warta Kesmas*, pp. 6–9.
- Kemendes RI (2018). Cegah Stunting, itu Penting. *Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI*.
- Kementerian Kesehatan RI (2017) Profil Kesehatan Indonesia 2017. doi: 10.1002/qj.
- Kemendagri, K. (2020). *Situasi Stunting di Indonesia. Kementerian Kesehatan RI*.
- Kesri, B. J. D. dan I. (2018). Situasi Balita Pendek Stunting di Indonesia. *Jakarta. Pusdatin Kemendagri Kesehatan RI*. doi: 10.36497/jri.v40i2.101.
- Maulidiah, S. (2014). *Pelayanan Publik*.
- Miles, B. M. dan M. H. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. *Jakarta: UIP*.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.
- Muchlis, N., Haeruddin and Susanti, N. (2022). Pola Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penanganan Stunting di Wilayah Kerja

Puskesmas Maiwa sebagai Lokasi Khusus Stunting Kabupaten Enrekang. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 13(1), pp. 180–185.

Oktarina, S., Saiban, K. and Wahyudi, C. (2022). Innovation for Handling Stunting Based on Community Empowerment in Gampong Ara, Kembang Tanjong Sub-District, Pidie District, Aceh Province of Indonesia (Study of Policy Implementation Based on Pidie Regent Regulation Number 77 of 2017 about Reduction in Stu. *International Journal of Research in Social Science and Humanities*, 03(03), pp. 12–24.

Peraturan Presiden. (2021). Presidential Decree of Republic Indonesia No 72/2021 about Accelerating Stunting Reduction. *Indonesian Government*, (1), p. 23.

Peraturan Presiden Republik RI No 42 (2013). Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif.

Rahayu, M. and Sari, I. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(1), pp. 19–25. doi: 10.31603/bisnisekonomi.v16i1.2127.

Riyadh, N. A., Batara, A. S. and Nurlinda, A. (2022). Efektivitas Kebijakan dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Enrekang. *Journal of Muslim Community Health (JMCH) 2023*, 4(1), pp. 1–17.

Samodra Wibawa (1994). Kebijakan Publik. *Intermedia Jakarta*.

Susilawati, M. D., Sulistiowati, E. and Hartati, N. S. (2020). Peran Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Lima Provinsi, Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 4(1), pp. 13–22. doi: 10.22435/jpppk.v4i1.3212.

WHO (2009). Child Growth Standards: Length/height-for-Age, Weight for-Age, Weight-for-Length, Weight-for-Height and Body Mass Index-for-Age: Methods and Development. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 51(12), pp. 1002–1002. doi: 10.1111/j.1469-8749.2009.03503.x.

WHO (2010). Infant Mortality. *World Health Organization*.

- WHO (2014). *World's Adolescents: A Second Chance in the Second Secade. Geneva, World Health Organization Departemen of Noncommunicable Disease Surveillance. World Health Organization.*
- Wididiati, P., Nurcahyanto, H. and Marom, A. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Di Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek). *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(4), pp. 1–16.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.*
- Wulandari, R. A., Utari, P. and Hastjarjo, S. (2021). Health Awareness About Stunting in The Circle of Poverty: Pagejungan Village Brebes. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(12), pp. 676–682.
- Yunus, P., Septiyanti and Rahman (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Stunting di Puskesmas Antang Kota Makassar. *Window of Public Health Journal*, 2(3), pp. 1285–1294. doi: 10.33096/woph.v2i3.479.

**LAMPIRAN**

**Lampiran 1. Kuesioner Pernyataan Kesediaan Menjadi Responden**

**PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN**



**INFORMED CONSENT PENELITIAN**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN  
STUNTING DI KABUPATEN ENREKANG**

---

---

**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Umur : .....  
Jenis Kelamin : L / P  
Jabatan : .....  
No Telp / Hp : .....  
Alamat : .....

Dengan ini saya menyatakan setuju dan bersedia untuk berpartisipasi sebagai informan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh saudari Puput Putri selaku mahasiswi Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Enrekang”**. Saya akan memberikan informasi yang sebenarnya sesuai yang saya ketahui dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta menyetujui metode pengambilan informasi yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan wawancara, menggunakan alat perekam suara dan alat dokumentasi (kamera).

Enrekang, Januari 2023

Informan,

( )

**Lampiran 2. Pedoman Wawancara Responden**



**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN  
STUNTING DI KABUPATEN ENREKANG**

**Pedoman Wawancara**

**1. DINAS KESEHATAN**

**2. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Nama Informan : .....  
Umur Informan : .....  
Jenis Kelamin : L / P  
Jabatan : .....  
No Telp / HP : .....  
Alamat : .....  
Tanggal wawancara : \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_\_ (tgl/bln/thn)

<b>Variabel</b>	<b>Topik Wawancara</b>	<b>Probing</b>
Komunikasi	Komunikasi Kebijakan Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Enrekang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada kebijakan yang mengatur penanggulangan program stunting, Bagaimana proses langkah-langkah terbentuknya kebijakan tersebut?</li><li>2. Bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, dan bagaimana sosialisasi dan bimbingan teknis?</li><li>3. Sejauh mana kebijakan tersebut telah diterapkan</li><li>4. Bagaimana informasi kegiatan program stunting disampaikan?</li></ol>
Sumber Daya	1. Kesiapan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana kondisi SDM yang dimiliki, adakah petugas khusus yang di Surat Keputusan untuk pengelola</li></ol>

		<p>kegiatan penanggulangan stunting, sejauh mana standar kompetensi yang sudah dimiliki ?</p> <p>2. Bagaimana tim dalam pengelolaan kegiatan penanggulangan stunting?</p>
	2. Kesiapan Sumber Daya Lainnya (Dana, fasilitas)	<p>1. Bagaimana proses pengusulan dana dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Enrekang?</p> <p>2. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, jenis prasarana dan sarana yang ada ?</p>
Sikap/Disposisi	Komitmen terhadap Kebijakan Program Penanggulangan Stunting	<p>1. Bagaimana komitmen Pemerintah Daerah dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Enrekang?</p> <p>2. Bagaimana komitmen lintas sektor penanggulangan Stunting?</p> <p>3. Bagaimana uraian tugas dan wewenang masing-masing tim?</p>
Struktur Birokrasi	Rancangan Struktur Birokrasi yang berlaku	<p>1. Apakah ada SOP yang berlaku dalam melaksanakan pencegahan stunting?</p> <p>2. Apakah ada struktur organisasi yang dibentuk dalam pelaksanaan pencegahan stunting pada program stunting?</p>



**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN**  
**STUNTING DI KABUPATEN ENREKANG**

---

---

**Pedoman Wawancara**

1. Dinas Perikanan dan Peternakan (DISKANAK)
2. Dinas Pendidikan (DISDIK)
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
4. Dinas Sosial (DINSOS)
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DISKOMINFO-Statistik)
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA)

Nama Informan : .....

Umur Informan : .....

Jenis Kelamin : L / P

Jabatan : .....

No Telp / HP : .....

Alamat : .....

Tanggal wawancara : \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_\_ (tgl/bln/thn)

<b>Variabel</b>	<b>Topik Wawancara</b>	<b>Probing</b>
Komunikasi	Komunikasi Kebijakan Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Enrekang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada kebijakan yang mengatur penanggulangan program stunting, Bagaimana proses langkah-langkah terbentuknya kebijakan tersebut?</li><li>2. Bagaimana informasi kegiatan program stunting disampaikan?</li></ol>
Sumber Daya	1. Kesiapan Sumber Daya Manusia	1. Bagaimana kondisi SDM yang dimiliki, adakah petugas khusus yang di Surat Keputusan untuk pengelola kegiatan penanggulangan stunting, sejauh mana standar kompetensi yang sudah dimiliki?
	2. Kesiapan Sumber Daya	2. Bagaimana ketersediaan dana

	Lainnya (Dana, fasilitas)	<p>dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Enrekang?</p> <p>3. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, jenis prasarana dan sarana yang ada ?</p>
Sikap/Disposisi	Komitmen terhadap Kebijakan Program Penanggulangan Stunting	<p>1. Bagaimana komitmen Pemerintah Daerah dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Enrekang?</p> <p>2. Bagaimana uraian tugas dan wewenang masing-masing tim?</p>
Struktur Birokrasi	Rancangan Struktur Birokrasi yang berlaku	<p>1. Apakah ada SOP yang berlaku dalam melaksanakan pencegahan stunting?</p> <p>2. Apakah ada struktur organisasi yang dibentuk dalam pelaksanaan pencegahan stunting pada program stunting?</p>



**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN**  
**STUNTING DI KABUPATEN ENREKANG**

---

---

**Pedoman Wawancara Kepala/Staff PUSKESMAS**

Nama Informan : .....

Umur Informan : .....

Jenis Kelamin : L / P

No Telp / HP : .....

Alamat : .....

Tanggal wawancara : \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_\_ (tgl/bln/thn)

<b>Variabel</b>	<b>Topik Wawancara</b>	<b>Probing</b>
Komunikasi	Komunikasi tentang Kebijakan Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Enrekang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana implementasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan Stunting lapangan?</li><li>2. Bagaimana menyampaikan informasi kegiatan stunting ke masyarakat?</li></ol>
Sumber Daya	Kesiapan Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait ketersediaan SDM dalam pelaksanaan pecegahan stunting pada program stunting?</li><li>2. Bagaimana kesediaan sumber dana penanggulangan stunting di Puskesmas?</li><li>3. Bagaimana kesediaan sarana dan prasarana?</li></ol>



**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN**  
**STUNTING DI KABUPATEN ENREKANG**

---

---

**Pedoman Wawancara Masyarakat**

Nama Informan : .....

Umur Informan : .....

Jenis Kelamin : L / P

No Telp / HP : .....

Alamat : .....

Tanggal wawancara : \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_\_ (tgl/bln/thn)

<b>Variabel</b>	<b>Topik Wawancara</b>	<b>Probing</b>
Komunikasi	Komunikasi terkait Kebijakan Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Enrekang	1. Apa saja bapak/ibu ketahui kebijakan program stunting saat ini di Kab Enrekang? 2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan program stunting di Kabupaten Enrekang?
Sumber Daya	Kesiapan Sumber Daya	Bagaimana ketersediaan fasilitas menurut bapak/ibu untuk pelaksanaan pencegahan stunting pada program stunting?

### Lampiran 3. Surat Etik Penelitian FKM Unhas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245, Telp. (0411) 585658,  
E-mail : [fkunhas@gmail.com](mailto:fkunhas@gmail.com), website: <https://fkunhas.ac.id/>

#### REKOMENDASI PERSETUJUAN ETIK

Nomor : 842/UN4.14.1/TP.01.02/2023

Tanggal : 12 Januari 2023

Dengan ini Menyatakan bahwa Protokol dan Dokumen yang Berhubungan dengan Protokol berikut ini telah mendapatkan Persetujuan Etik :

No. Protokol	301222012397	No. Sponsor Protokol	
Peneliti Utama	<b>Puput Putri</b>	Sponsor	Pribadi
Judul Peneliti	<b>Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Enrekang</b>		
No. Versi Protokol	1	Tanggal Versi	30 Desember 2022
No. Versi PSP	1	Tanggal Versi	30 Desember 2022
Tempat Penelitian	<b>Kabupaten Enrekang</b>		
Judul Review	<input type="checkbox"/> Exempted <input checked="" type="checkbox"/> Expedited <input type="checkbox"/> Fullboard	Masa Berlaku <b>12 Januari 2023 Sampai 12 Januari 2024</b>	Frekuensi review lanjutan
Ketua Komisi Etik Penelitian	Nama : Prof.dr. Veni Hadju, M.Sc, Ph.D	Tanda tangan 	Tanggal 12 Januari 2023 
Sekretaris komisi Etik Penelitian	Nama : Dr. Wahiduddin, SKM., M.Kes	Tanda tangan 	Tanggal 12 Januari 2023 

Kewajiban Peneliti Utama :

1. Menyerahkan Amandemen Protokol untuk persetujuan sebelum di implementasikan
2. Menyerahkan Laporan SAE ke Komisi Etik dalam 24 Jam dan dilengkapi dalam 7 hari dan Laporan SUSAR dalam 72 Jam setelah Peneliti Utama menerima laporan
3. Menyerahkan Laporan Kemajuan (progress report) setiap 6 bulan untuk penelitian resiko tinggi dan setiap setahun untuk penelitian resiko rendah
4. Menyerahkan laporan akhir setelah Penelitian berakhir
5. Melaporkan penyimpangan dari protocol yang disetujui (protocol deviation/violation)
6. Mematuhi semua peraturan yang ditentukan



## Lampiran 4. Surat Izin Penelitian FKM Unhas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245, Telp. (0411) 585658  
E-mail : [fkm.unhas@gmail.com](mailto:fkm.unhas@gmail.com), website : <https://fkm.unhas.ac.id/>

No : 938/UN4.14.1/PT.01.04/2023  
Lamp : Proposal  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

16 Januari 2023

Yth.  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan  
Provinsi Sulawesi Selatan**  
Di –  
Tempat

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Puput Putri**  
Nomor Pokok : **K012211048**  
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka persiapan penulisan tesis dengan judul "**Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Enrekang**".

Pembimbing : 1. Prof. Sukri Palutturi, SKM.,M.Kes.,M.Sc.PH.,Ph.D (Ketua)  
2. Dr. Balqis, SKM, M.Kes, M.Sc.PH (Anggota)

Waktu Penelitian : Januari – Maret 2023

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kebijaksanaan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin kepada yang bersangkutan.

Atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

  
**Dr. Wahiduddin, SKM.,M.Kes**  
NIP. 19760407 200501 1 004

Tembusan :  
1. Dekan FKM Unhas  
2. Mahasiswa yang bersangkutan  
3. Peringgal



### Lampiran 3. Surat Izin Penelitian PTSP Provinsi Sul-Sel



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : 13786/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.  
Lampiran : - Bupati Enrekang  
Perihal : Izin penelitian

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kesehatan Masyarakat UNHAS Makassar Nomor : 938/UN4.14.1/PT.01.04/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : PUPUT PUTRI  
Nomor Pokok : K012211048  
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

**" IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KAB. ENREKANG "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **19 Januari s/d 18 Maret 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 19 Januari 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kesehatan Masyarakat UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

## Lampiran 4. Surat Izin Penelitian PTSP Kab. Enrekang

  
**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079*

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor: 73.16/051/DPMTSP/ENR/IP/1/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

**PUPUT PUTRI**

Nomor Induk Mahasiswa : K012211048  
Program Studi : ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  
Lembaga : UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR  
Pekerjaan Peneliti : MAHASISWA  
Alamat Peneliti : HOMBES KEL. TOMENAWA KEC. BARAKA  
Lokasi Penelitian : TERLAMPIR  
Anggota/Pengikut : -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN TESIS** dengan Judul :  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KAB. ENREKANG**

Lamanya Penelitian : 2023-01-19 s/d 2023-03-18

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang  
19/01/2023 13:21:23  
KEPALA DINAS,



  
Dr. Ir. CHAIDAR BILIU, ST, MT  
Pangkat: Pembina Tk. I  
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat peneliti
4. Mahasiswa ybs.

 Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah diandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

LAMPIRAN : SURAT KETERANGAN PENELITIAN  
NOMOR : 73.16/051/DPMTSP/ENR/IP/I/2023  
TANGGAL : 19 JANUARI 2023

DAFTAR LOKASI PENELITIAN/PENGAMBILAN DATA

1. DINAS KESEHATAN
2. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
3. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
5. DINAS PENDIDIKAN
6. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7. DINAS SOSIAL
8. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
10. PUSKESMAS BARAKA
11. PUSKESMAS BUNTU BATU

Ditetapkan di : Enrekang  
19/01/2023 13:21:23  
KEPALA DINAS,



Dr. Ir. CHAIDAR BULU, ST, MT  
Pangkat: Pembina Tk.1  
NIP. 19750528 200212 1 005

**Lampiran 5. Matriks Wawancara**

**MATRIKS WAWANCARA INFORMAN KEPALA/STAFF  
DINAS KESEHATAN, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Faktor Komunikasi					
No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1	Menurut Bapak/Ibu apakah ada kebijakan yang mengatur program penanggulangan stunting, Bagaimana proses langkah-langkah terbentuknya kebijakan tersebut?	K	Antara lain kebijakan kita sudah membuat beberapa peraturan bupati ada yang dalam bentuk perda dan peraturan lain pokoknya luar biasa kebijakan yang kita ambil karena karena memang di Sulawesi selatan itu di Enrekang itu lokus pencegahan stunting termasuk dengan bone. Keputusan Bupati Enrekang Nomor 440/KEP/IX/2018 tentang Gerakan Masyarakat Peduli Stunting (GEMPITA) dan dibentuk TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting)	Dari hasil wawancara yang dilakukan informan menyebutkan kebijakan program stunting saat ini adalah GEMPITA, Pembentukan TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting)	Dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dibuat untuk program stunting adalah Keputusan Bupati Enrekang Nomor 440/KEP/IX/2018 tentang Gerakan Masyarakat Peduli Stunting (GEMPITA) Keputusan Bupati Enrekang Nomor 141/KEP/III/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Enrekang.
		DS	Kebijakan program Stunting ini termasuk dalam tugas TPK (Tim Pendamping Keluarga). TPK ini merupakan sekelompok tenaga yang terdiri dari bidan, PKK dan kader KB. Adanya pembentukan TPK tentunya sesuai dengan Perpres 72 tahun		

			2021 tentang percepatan penurunan Stunting.		
2	Bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, dan bagaimana sosialisasi dan bimbingan teknis?	K	Kalau penerapan seperti biasa kita lakukan di Dinas Kesehatan, ada pertemuan, ada <i>monev</i> , standarnya ada yaitu jenis kegiatannya 1000 HPK, Surveilan ePPGBM (Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), KPM, Rembuk stunting pembelian PMT tetapi hanya sedikit, penanggulangan masalah gizi	Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, informan mengatakan Kegiatan program stunting dilaksanakan sesuai dengan standar operasional program gizi, Diterapkan setelah dibentuknya tim koordinasi stunting, disosialisasikan ketika rapat koordinasi pertama dengan penanggung jawab Dinas KB, bimbingan teknisnya dilaksanakan pada saat pelaksanaan 8 aksi konvergensi.	Kegiatan program stunting seperti pertemuan, monev sesuai dengan pedoman yang berlaku dan Kebijakan telah dilakukan yang diketuai oleh ketua tim yaitu Wakil Bupati Enrekang dengan Penanggungjawab Dinas KB
		DS	Setelah ada kebijakan tersebut, maka dibentuknya tim stunting Kabupaten Enrekang. Dan diketuai oleh Wakil Bupati, dan OPD terkait, setelah adanya kebijakan dan terbentuknya tim teknis maka dimulailah koordinasi dengan OPD terkait dan sebagai penanggungjawabnya adalah kami sendiri Dinas KB. Untuk sosialisasi awalnya dilaksanakan saat rapat koordinasi yang pertama di Bappeda dengan dibagikan SK tim. Bimbingan teknisnya pada saat pelaksanaan 8 aksi konvergensi.		
3	Sejauh mana kebijakan tersebut	K	Kebijakannya sudah baik dan sudah diterapkan. tetapi masih banyak	Dari hasil wawancara yang	Kebijakan sudah diterapkan tetapi masih banyak

	telah diterapkan?		hambatan didalam koordinasi lintas OPD	dilakukan, kebijakan sudah diterapkan	hambatan
		DS	Yah yang kita ketahui sudah baik tapi mungkin belum maksimal	koordinasinya belum maksimal.	
4	Bagaimana informasi kegiatan program stunting disampaikan?	K	Informasi disampaikan pada saat rapat bulanan di Dinas KB, sosialisasi dalam bentuk media <i>whatsapp</i> dan email	Dari hasil wawancara yang dilakukan, Informasi disampaikan pada saat rapat bulanan, sosialisasi, <i>whatsapp</i>	Informasi telah disampaikan dengan baik
		DS	Diinformasikan pada rapat bulanan di Dinas KB, biasanya informasi kegiatan ini juga dalam bentuk online dan offline		

Faktor Sumber Daya					
No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1	Bagaimana kondisi SDM yang dimiliki, adakah petugas khusus yang di Surat Keputusan untuk pengelola kegiatan penanggulangan stunting, sejauh mana standar kompetensi yang sudah dimiliki ?	K	Jika SDM nya di bidang kesehatan yakni jajaran Dinkes yakni Kepala Dinas, Bidang Kesmas, Bidang SDK, Bidang P2P dan Bidang Yankes, untuk SDM khususnya petugas gizi dengan latar belakang gizi baru 9 Puskesmas dari 13 Puskesmas, selebihnya bidan dan perawat.	SDMnya sesuai lampiran SK Perbup yakni Kepala Dinas, Bidang Kesmas, Bidang SDK, Bidang P2P dan Bidang Yankes, dan dari Puskesmas yang berlatar belakang gizi baru 13 Puskesmas. Sudah ada perjanjian kontrak kerja dengan tenaga lain.	Jumlah SDM belum memenuhi kebutuhan yang ada
		DS	Ada beberapa perjanjian kontrak kerja antara tenaga promkes, sanitarian, tenaga nutrisi itu berlaku satu tahun anggaran, dan diperpanjang lagi tahun berikutnya bila dipandang relevan.		

2	Bagaimana tim dalam pengelolaan kegiatan penanggulangan stunting?	K	Masih tetap menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing tetapi masih menyesuaikan kondisi pada saat pelaksanaan.	Dari hasil wawancara, informan menyatakan bahwa telah menjalankan tugas sesuai tupoksi	Berjalan sesuai dengan uraian tugas masing-masing
		DS	Kita punya tugas masing-masing dan dikerjakan sesuai tupoksinya		
3	Bagaimana masalah dana dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Enrekang?	K	Pengusulan dana sendiri di Kab. Enrekang sudah dianggarkan tetapi masih belum mencukupi, artinya untuk kedepannya akan dimaksimalkan lagi supaya percepatan penurunan stunting. Dananya masih terbatas dan belum mencukupi untuk kegiatan-kegiatan Sudah ada anggaran dalam penanggulangan stunting Dana sudah dianggarkan tetapi belum mencukupi. yang sudah direncanakan.	Dari hasil wawancara yang dilakukan, informan menyatakan dana sudah dianggarkan tetapi belum mencukupi.	Sudah ada anggaran dalam penanggulangan stunting
		DS	Sudah ada dana dan untuk program stunting ada Namanya BOK (Biaya Operasional) dari pusat, biaya ini digunakan untuk diberi ke pendamping keluarga, evaluasi lokmin, dan dana untuk audit.		
4	Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, jenis prasarana dan sarana	K	Salah satu kendala yakni alat antropometri, tetapi tahun ini kita menganggarkan untuk membeli antropometri tetapi masih terbatas, belum seluruh Desa	Dari wawancara yang dilakukan, informan menyatakan jika kendala di alat antropometri	Sarana prasarana seperti Alat antropometri sudah ada tetapi belum mencukupi
		DS	Untuk saran kita masih sangat terbatas		

	yang ada?			tidak sesuai kebutuhan.	
--	-----------	--	--	-------------------------	--

<b>Faktor Sikap/Disposisi</b>					
<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Reduksi</b>	<b>Kesimpulan</b>
1	Bagaimana komitmen Pemerintah Daerah dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Enrekang?	K	Ada komitmen yang diresmikan di acara Rembuk Stunting 2022	Bupati sangat berkomitmen untuk penurunan stuning. Ada komitmen yang diresmikan di acara Rembuk Stunting 2022	Komitemen pemerintah sudah ada
		DS	Setelah kepala daerah mengetahui Kab. Enrekang menjadi lokus bahkan Kab. Enrekang memiliki presentasi tertinggi. Bupati sangat berkomitmen untuk penurunan stunting.		
2	Bagaimana komitmen lintas sentor penanggulangan Stunting?	K	Komitmennya kepala Desa sangat mendukung sekali, Dinas lain juga mendukung berupa penyuluhan, Babinsa juga hadir memberikan motivasi, ada Kepala Puskesmas dan TPG (Tenaga Pendamping Gizi) nya juga, PKK juga aktif dari kecamatan dan pemerintah Desa juga aktif	Dari wawancara yang dilakukan, jika komitmen lintas sector mendukung, dalam pelaksanaan penurunan stunting	Komitmen sudah ada tetapi belum maksimal
		DS	Belum terlalu maksimal di lakukan, kalo dari kecamatan,		

			perangkat Desa melakukan kegiatan di posyandu melakukan advokasi kader		
3	Bagaimana uraian tugas dan wewenang masing-masing tim?	K	Ada dalam SK TPPS	Ada uraian tugas dan wewenang di lampiran SK TPPS	Ada surat keputusan tentang uraian tugas
		DS	Ada uraian tugas dan wewenang di lampiran SK		

<b>Faktor Struktur Birokrasi</b>					
<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Reduksi</b>	<b>Kesimpulan</b>
1	Apakah ada SOP yang berlaku dalam melaksanakan pencegahan stunting?	K	Belum ada SOP yang mengatur secara khusus tentang pencegahan stunting, SOP yang ada baru terkait pelacakan kasus stunting, acuannya langsung ke Perpres 72 Tahun 2021	Berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada informan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan stunting pada program stunting di Kabupaten Enrekang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting	SOP implementasi kebijakan stunting pada program stunting di Kabupaten Enrekang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021
		DS	Dalam pelaksanaan aksi konvergensi, sampai saat belum ada SOP tersendiri, kami masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting serta petunjuk dari provinsi		
2	Apakah ada struktur organisasi yang dibentuk dalam	K	Kalau pembagian kerja dan tanggung jawab saya kira sudah jelas, dan bukan menjadi	Dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting pada program	Dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi program stunting sudah ada yaitu Tim

pelaksanaan pencegahan stunting pada program stunting?		masalah lagi, dan sudah diperkuat dengan SK yang ada, tinggal komitmen dalam melaksanakan tanggung jawab yang ada, karena penyelesaian stunting ini tidak dapat selesai kalau hanya sekedar rapat saja, bicara stunting bukan hanya Dinas Kesehatan saja tapi bagaimana semua stakeholder memahami dan menjalankan peran dan tugasnya masing-masing	stunting di Kabupaten Enrekang, pemerintah daerah telah melaksanakan pembagian kerja dan tanggung jawab kepada seluruh pelaksana program stunting. Untuk itu tim percepatan kabupaten telah dibentuk dengan pembagian kerja dan tanggung jawab yang didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting	TPPS Kab. Enrekang
	DS	Pembagian kerja dan tanggung jawab sudah jelas berdasarkan Surat Keputusan Bapak Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting baik yang ada di tingkat kabupaten. Saya berharap semua stakeholder dapat bekerja sama dalam menjalankan tugas masing-masing dengan baik, memiliki komitmen yang baik sehingga kita dapat mencapai target penurunan prevalensi stunting 14% di tahun 2024		

### Matriks Wawancara Informan Kepala/Staff

**Dinas Perikanan dan Peternakan (DISKANAK), Dinas Pendidikan (DISDIK), Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Sosial (DINSOS), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DISKOMINFO-Statistik) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA)**

Faktor Komunikasi					
No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1	Menurut Bapak/Ibu apakah ada kebijakan yang mengatur penanggulangan program stunting, Bagaimana proses langkah-langkah terbentuknya kebijakan tersebut?	S	TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting)	Dari hasil wawancara yang dilakukan informan menyebutkan kebijakan program stunting saat ini adalah GEMPITA, Pembentukan TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting)	Dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dibuat untuk program stunting adalah Keputusan Bupati Enrekang Nomor 440/KEP/IX/2018 tentang Gerakan Masyarakat Peduli Stunting (GEMPITA) Keputusan Bupati Enrekang Nomor 141/KEP/III/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Enrekang.
		M	Setau saya untuk sekarang GEMPITA yah karena kita pernah Kerjasama dengan Dinkes membawakan sosialisasi terkait GEMPITA di sekolah Paud yang ada di Enrekang		
		MS	Ada Keputusan Bupati Enrekang Nomor 440/KEP/IX/2018 tentang Gerakan Masyarakat Peduli Stunting (GEMPITA) dan dibentuk TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting)		
		S	GEMPITA yah setau aku saat ini		
		MA	Kemarin yang kami sebar informasinya itu ada Namanya GEMPITA dan bagi-bagi sembako di desa-desa		

		IMW	GEMPITA masih kita jalankan dari tahun 2018 sampai saat ini mungkin lebih di upgrade sama Dinkes dan Dinas KB lagi		
2	Bagaimana informasi kegiatan program stunting disampaikan?	S	Informasi disampaikan sering lewat wa, email, telpon dan rapat di dinas	Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, Interpertasi media yang digunakan whatsapp, telepon email dan rapat rutin	Menggunakan media dalam menyampaikan informasi kegiatan program stunting
		M	Paling sering itu lewat wa		
		MS	Biasanya kita ketemu di Dinas KB, online juga		
		S	Kadang itu lewat wa ji biasa juga email dan ketemu langsung di Dinas KB		
		MA	Rapat di Dinas		
		IMW	Informasinya biasa dikirim lewat wa		

Faktor Sumber Daya					
No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1	Bagaimana kondisi SDM yang dimiliki, adakah petugas khusus yang di Surat Keputusan untuk pengelola kegiatan penanggulangan stunting, sejauh mana	S	Ketersediaan SDM belum cukup memadai, dan mungkin yang SDM sekarang perlu ada peningkatan kompetensi	Dari hasil wawancara yang mendalam, informan menyatakan bahwa ketersediaan SDM belum cukup atau belum memadai, dan masih ada petugas gizi dijalankan oleh perawat/bidan	Jumlah SDM belum memenuhi kebutuhan yang ada
		M	Masih terbatas, apalagi sangat sedikit yang latar belakang gizi		
		MS	Kalau SDM itu masih terbatas kebanyakan juga disini		

	standar kompetensi yang sudah dimiliki?		perawat/bidan		
		S	Belum cukup memadai		
		MA	Masih terbatas		
		IMW	Belum cukup memadai untuk sekarang		
2	Bagaimana ketersediaan dana dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Enrekang?	S	Anggaran itu ada tapi belum cukup	Dari hasil wawancara yang dilakukan, informan menyatakan dana sudah dianggarkan tetapi belum mencukupi.	Sudah ada anggaran dalam penanggulangan stunting
		M	Anggaran kami sudah cukup dan memadai untuk mendukung program kami, yaitu sosialisasi dan pelatihan terkait penanganan stunting di tingkat paud		
		MS	Kalau kita sendiri itu cukup karena kita juga sudah punya dana sendiri		
		S	Iya cukup tapi mungkin bisa didanakan lagi		
		MA	Kalua anggaran sudah ada, tapi masih terbatas		
		IMW	Belum cukup memadai untuk sekarang		
3	Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, jenis prasarana dan sarana yang ada?	S	Belum cukup memadai, tapi kalau dibilang ada yah ada	Dari wawancara yang dilakukan, informan menyatakan ketersediaan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan program stunting belum cukup memadai, yang masih menjadi masalah adalah	Untuk sarana dan prasara sudah ada namun belum cukup memadai seperti alat antropometri masih kurang
		M	Untuk fasilitas itu sudah ada tapi kita masih membutuhkan lagi seperti alat antropometri untuk di bawa ke lapangan		
		MS	Sudah cukup		
		S	Sudah ada disediakan tapi masih		

			belum memadai	ketersediaan fasilitas pendukung di sektor kesehatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan	
		MA	Belum memadai		
		IMW	Belum cukup memadai		

Faktor Sikap/Disposisi					
No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1	Bagaimana komitmen Pemerintah Daerah dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Enrekang?	S	Pemerintah sangat aktif dan mendukung terkait pelaksanaan program stunting ini,	Dari hasil wawancara yang dilakukan, informan menyatakan bahwa komitmen pemerintah sangat aktif dan mendukung program penanggulangan stunting ini	Komitmen pemerintah sudah sangat bagus
		M	Sangat aktif, dan komitmennya sangat luar biasa		
		MS	Pemerintah daerah dalam hal ini bupati, waki bupati dan kepala dinas sangat mendukung dan berkomitmen dalam mendukung kegiatan percepatan penurunan stunting		
		S	Sangat mendukung program ini		
		MA	Komitmen dan dukungan pemerintah sudah cukup bagus		
		IMW	Sangat berperan aktif		
		2	Bagaimana uraian tugas dan wewenang masing-masing tim?		
M	Iya dek ada, dan sangat jelas kita harus laksanakan				
MS	Ada tugas masing-masing				

			instansi, dan wajib untuk dilaksanakan	tanggungjawab masing-masing instansi. Dan mereka juga melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku	mereka melakukan program tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku
		S	Ada, iya		
		MA	Iya ada dan dilaksanakan		
		IMW	Untuk tugas fungsi dan wewenang sudah tentu ada yah dan juga kita harus laksanakan		

<b>Faktor Struktur Birokrasi</b>					
<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Reduksi</b>	<b>Kesimpulan</b>
1	Apakah ada SOP yang berlaku dalam melaksanakan pencegahan stunting?	S	Setau saya ada SOP standar yang di pakai yang dari undang-undang no 72	Dari hasil wawancara yang dilakukan di dapatkan bahwa semua informan mengatakan bahwa ada SOP yang berlaku dalam melaksanakan pencegahan stunting yang mengacuh UU No 72	Dapat disimpulkan dari hasil wawancara yang dilakukan yaitu semua informan menyatakan bahwa ada SOP yang berlaku dalam melaksanakan pencegahan stunting
		M	Setiap program itu ada memang SOPnya		
		MS	Iya ada,		
		S	Ada		
		MA	Ada SOP standar yang di pakai yang terkait Undang-undang		
		IMW	Ada SOP setiap kegiatan yang mau dijalankan		
2	Apakah ada struktur organisasi yang dibentuk dalam pelaksanaan pencegahan stunting pada program stunting?	S	Iya ada Namanya Tim TPPS yang ketuanya Bapak Wakil Bupati Enrekang itu sendiri	Semua informan mengatakan bahwa ada struktur organisasi dalam pelaksanaan program stunting yang dinamakan Tim TPPS Kab. Enrekang yang menjadi ketua yaitu Wakil	Dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi program stunting sudah ada yaitu Tim TPPS Kab. Enrekang
		M	Untuk pembagian kerja, saya rasa sudah sangat jelas, apalagi sudah diperkuat dengan SK, sehinggalan penanganan terkait		

			stunting akan lebih baik	Bupati Enrekang	
		MS	Ada		
		S	Ada		
		MA	Pembagian kerja dan tanggung jawab sudah jelas, masing-masing sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing		
		IMW	Iya ada		

**MATRIKS WAWANCARA INFORMAN KEPALA/STAFF PUSKESMAS**

**Faktor Komunikasi**

No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1	Bagaimana implementasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan Stunting lapangan?	HGS	Setelah kami mengetahui Desa kami menjadi lokus stunting, kami mengkroscek data untuk memastikan data apakah benar valid, setelah itu kami mengadakan rembuk stunting Desa, untuk menyampaikan data yang sudah ada dan merencanakan bagaimana penurunan stunting di Kecamatan Baraka dan kemarin diambil kesimpulan dibuatlah satu kelompok rumah Desa sehat, ada kader pembangunan manusia, bidan Desa, dan kader untuk mengadakan kegiatan rutin yakni seminggu sekali diberikan edukasi dan penyuluhan gizi dari balita, ada pemeriksaan rutin, pemberian pmt, dananya dari Desa berupa susu, telur, roti jadi pmtnya bervariasi	Dari hasil wawancara yang dilakukan informan mengatakan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan pemberina PMT, penyuluhan, konselor, pelatihanpelatihan	Kegiatan telah dilaksanakan dalam program penanggulangan stunting
H	Beberapa pendampingan di posyandu, konselor				

			terhadap ibu balita, kemudian distribusikan PMT dari dinas di Desa lokus stunting		
2	Bagaimana menyampaikan informasi kegiatan stunting ke masyarakat?	HGS	Kalo kegiatan kami disampaikan melalui lokmin (lokakarya mini), pada saat penyuluhan, kami telpon kadernya, posyandu sudah rutin masyarakat sudah tau	Dari hasil wawancara yang dilakukan informan mengatakan bahwa informasi disampaikan pada saat lokmin, penyuluhan, surat, dan telephone.	Dapat disimpulkan bahwa Informasi dilakukan satu arah
		H	Melalui surat, Lokmin, lintas sektor, penyuluhan		

#### Faktor Sumber Daya

No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1	Bagaimana menurut bapak/ibu terkait ketersediaan SDM dalam pelaksanaan pencegahan stunting pada program stunting?	HGS	Sudah cukup, karena SDM yang pilih itu dari Dinkes maupun Dinas KB	Dari hasil wawancara yang dilakukan, informan mengatakan ketersediaan SDM sudah mencukupi dan dan SDM sendiri dikelola oleh Dinkes dan Dinas KB	Dapat disimpulkan ketersediaan SDM program stunting sudah mencukupi di wilayah puskesmas
		H	Iya sudah cukup		
2	Bagaimana kesediaan sumber dana penanggulangan stunting di Puskesmas?	HGS	Saat ini anggaran diserahkan langsung ke Dinas KB sebagai penanggungjawab Tim TPPS	Hasil wawancara informan mengatakan anggaran dikelola oleh Dinas KB sebagai penanggungjawab program stunting dan tidak ada anggaran yang masuk di	Dapat disimpulkan ketersediaan anggaran dipegang oleh Dinas KB untuk dikelola
		H	Mungkin yang tau itu Dinas KB yha		

				Pukesmas	
3	Bagaimana kesediaan sarana dan prasarana?	HGS	Sarana dan prasana antropometri sudah ada tapi kalau bisa di tambahkan lagi	Dari hasil wawancara, informan menyatakan bahwa sarana dan prasarana sudah ada seperti alat antropometri namun masih membutuhkan tambahan lagi	Dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana sudah ada
		H	Untuk sarana sudah ada		

### MATRIKS WAWANCARA INFORMAN MASYARAKAT

Faktor Komunikasi					
No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1	Apa saja bapak/ibu	PB	Yang sering saya dengar itu ada	Dari hasil wawancara	Dapat disimpulkan bahwa

	ketahui kebijakan program stunting saat ini di Kab Enrekang?		GEMPITA,	informan tidak mengetahui detail apa saja kebijakan stunting yang ada di Enrekang, hamper semua informan mengetahui program GEMPITA	informan semuanya mengetahui kebijakan program stunting yaitu GEMPITA namun tidak secara detail.
		IL	Pembagian tablet, imunisasi		
		NA	GEMPITA itu saya tau dari tahun 2018		
		SA	Banyak yang dilakukan puskesmas seperti posyandu		
2	Bagaimana pelaksanaan kebijakan program stunting di Kabupaten Enrekang?	PB	Saya tidak tau	Dari hasil wawancara, informan kurang mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan program stunting di Kab Enrekang	Dapat disimpulkan bahwa informan tidak mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan program stunting sudah maksimal atau belum.
		IL	-		
		NA	Mungkin yang tau itu Dinkes		
		SA	Kurang tau juga		

Faktor Sumber Daya					
No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1	Bagaimana ketersediaan fasilitas menurut bapak/ibu untuk pelaksanaan pencegahan stunting pada program stunting?	PB	Di desa saya sudah ada posyandu	Dari hasil wawancara yang dilakukan, informan mengatakan sudah terpenuhinya ketersediaan fasilitas maupun sarana	Dapat disimpulkan bahwa ketersediaan fasilitas sudah terpenuhi
		IL	Sudah terpenuhi		
		NA	Terpenuhi		
		SA	Terpenuhi		

**Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian**



**Gambar 1. Wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**



**Gambar 2. Wawancara dengan Diskominfo-Statistik**



**Gambar 3. Wawancara dengan Bapedda**



**Gambar 4. Wawancara dengan DINKES**



**Gambar 5. Wawancara dengan Dinas KB**



**Gambar 6. Wawancara dengan DISDIK**



**Gambar 7. Wawancara dengan Dinas Sosial**



**Gambar 8. Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Peternakan**



**Gambar 9. Wawancara dengan Puskesmas Baraka**



**Gambar 10. Wawancara dengan Puskesmas Buntubatu**

## Lampiran 10 Riwayat Hidup

### RIWAYAT HIDUP



#### A. Data Pribadi

1. Nama : Puput Putri
2. NIM : K012211048
3. Tempat / Tanggal Lahir : Bontang / 22 Mei 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Suku / Bangsa : Bugis / Indonesia
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jln. Kowilhm 3 P.K IV Makassar
8. Email : [ppuput188@gmail.com](mailto:ppuput188@gmail.com)
9. No. Hp : 082190698801

#### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2004 – 2010 :SDN 105 Baraka
2. 2010 – 2013 :SMP Negeri 1 Baraka
3. 2013 – 2016 :SMA Negeri 1 Baraka
4. 2016 – 2020 :S1 Kesehatan Masyarakat Departemen  
Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM Unhas